

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masalah Aceh dengan konflik antara Gerakan Aceh Merdeka yang di pimpin Hasan Tiro dan kawan-kawan di Swedia mulai mencapai perundingan kembali meski ini bukanlah perundingan yang pertama karena sebelumnya telah ada perundingan yang melibatkan Lembaga Swadaya Internasional lain yaitu Henry Dunant Center sebagai penengah dari pihak asing, maka setelah digagas oleh mantan Presiden Finlandia **Martti Ahtisaari** melalui **Crisis Management Initiative (CMI)**, sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat Internasional Pemerintah Republik Indonesia membuka kembali perundingan dengan pihak separatis Gerakan Aceh Merdeka yang berada di Swedia demi mencapai perdamaian menghentikan permusuhan demi membangun kembali Nanggroe Aceh Darussalam terutama pascabencana alam dunia tsunami.

Perundingan pertama yang digagas dari Crisis Management Initiative antara wakil dari pemerintah Republik Indonesia dengan pihak Gerakan Aceh Merdeka telah dilakukan tanggal 27 Januari 2005 di kota Helsinki, Finlandia¹. Perundingan pun berakhir dengan kebuntuan dan tidak menghasilkan kesepakatan. Pihak Indonesia untuk jangka waktu pendek pascatsunami adalah meminta dan menghendaki adanya keamanan pada relawan asing maupun lokal yang membantu Aceh pasca bencana Tsunami. Pihak Gerakan Aceh Merdeka di lapangan masih

¹ <http://www.bintan6.com> "Perundingan Helsinki" 12 Februari 2005

saja melakukan teror bahkan meresahkan para relawan karena seringnya gerilyawan Gerakan Aceh Merdeka melakukan penghadangan dan merampas bantuan untuk pengungsi tsunami.

Kekerasan masih menjadi pilihan yang diambil oleh pihak Gerakan Aceh Merdeka yang dapat memperkeruh situasi keamanan di Aceh pada masa-masa sulit seperti yang dialami rakyat Aceh pascabencana tsunami.

Untuk itu maka Pemerintah Indonesia melalui Departemen Luar Negeri Republik Indonesia terus memikirkan strategi-strategi dan diplomasi di tingkat internasional yang dapat digunakan untuk menyelesaikan konflik antara pihak Gerakan Aceh Merdeka yang berkewarganegaraan Swedia dengan Pemerintah Indonesia.

Pemberontakan separatis di Aceh dimulai pada 4 Desember 1976, ketika Muhammad Hasan di Tiro mendeklarasikan kemerdekaan Aceh. Di Tiro dan para pengikut setianya telah terlibat dalam pemberontakan Darul Islam 1953, tetapi kali ini pemberontakan mereka yang diberi nama Gerakan Aceh Merdeka (GAM) secara jelas berniat memisahkan diri dari Republik Indonesia dan menjadi negara berdaulat.

Tidak lama setelah deklarasi kemerdekaan tersebut, kekuatan bersenjata GAM mulai menyerang pasukan pemerintah, hal yang mengundang kembali operasi penumpasan pemberontakan oleh pemerintah. Pada tahun 1983, kekuatan GAM sudah dikalahkan di lapangan oleh pemerintah.

memilih Swedia. Ia bersama beberapa pengikutnya akhirnya menjadi warga negara Swedia.²

Hasan Tiro memilih Swedia sebagai tempat pelarian dan pengasingan karena selama ini memang menjadi surga bagi para pencari suaka dari Negara lain. Bahkan Komisi Pengungsi PBB (UNHCR) umumnya merekomendasikan Swedia kepada para pencari suaka, khususnya suaka politik bagi yang mengalami kesulitan hidup di negerinya. Dan yang paling utama mereka harus hidup di bawah pemerintahan seorang diktator.³

Begitu pula halnya Hasan Tiro yang melarikan diri kemudian memilih Swedia sebagai tempat pelarian bersama tokoh-tokoh lainnya. Mereka kemudian menjadi warga Negara Swedia dan mulai melakukan perjuangan dari Swedia. Mereka melakukan berbagai macam aksi di Aceh yang langsung dikoordinasikan dari Swedia. Hasan Tiro kemudian memimpin perjuangan demi memerdekakan Aceh bahkan sudah menyebut dirinya sebagai Presiden Gerakan Aceh Merdeka dari organisasi yang dideklarasikannya itu.

Hubungan Indonesia yang memanas dengan Swedia itu muncul setelah Hasan Tiro yang dinobatkan menjadi wali negeri, Zaini Abdullah sebagai Menteri Luar Negeri, Malik Mahmud sebagai Perdana Menteri, dan Zakaria Saman diangkat menjadi Menteri Pertahanan. Mereka mengatur Gerakan Aceh Merdeka itu dengan rapi seperti layaknya sebuah negara. Pemerintah Indonesia sudah mengirimkan pesan khusus kepada Interpol untuk membantu menangkap mereka

² http://www.kbri-canberra.org.au/s_issues/aceh/articles/articles_jalanpanjang.htm, "Konflik Aceh, Jalan Panjang Menuju Perdamaian".

³ <http://www.kompas.com>, "Negeri Damai Yang Gamang", Kamis, 19 Juni 2003.

dengan menyertakan bukti-bukti bahwa tokoh-tokoh tersebut terlibat dalam gerakan separatis dan teror dan kekacauan lainnya di Indonesia.

Dalam tataran diplomatik, Indonesia secara pro aktif telah beberapa kali meminta Pemerintah Swedia menangkap dan mengekstradisi warga negaranya yang terlibat, namun Pemerintah Swedia tidak menunjukkan kerja sama bahkan cenderung bersikap tidak peduli terhadap permintaan Indonesia tersebut.⁴

Pemerintah Indonesia akhirnya memutuskan untuk berunding dan melakukan dialog dengan pihak Gerakan Aceh Merdeka yang berada di Swedia. Pemerintah Indonesia menginginkan adanya penyelesaian dengan damai begitu pula dengan keinginan rakyat Aceh. Jalur perundingan bagi Pemerintah Indonesia juga sudah dilakukan beberapa kali, perundingan dengan tokoh Gerakan Aceh Merdeka Swedia juga pernah digagas oleh Lembaga Swadaya Internasional yaitu Henry Dunant Center sebagai penengah dari pihak asing.

Perundingan antara pihak Gerakan Aceh Merdeka Swedia dengan Pemerintah Indonesia dengan penengah **Henry Dunant Center** (HDC) dilakukan pada tahun 2002, hasil perundingan dinyatakan gagal karena pihak Gerakan Aceh Merdeka tetap membicarakan kemerdekaan Nanggroe Aceh Darussalam. Kedua pihak tidak mampu menghasilkan solusi yang tepat demi penyelesaian Aceh. Dalam tahun 2002 juga diadakan kesepakatan Jeneva yaitu kesepakatan *Jeneva* 2002 dengan disepakatinya *Joint Security Commision* (Komisi Keamanan Bersama) dan *Joint Monitoring System* (Komisi Pengawasan Bersama)

⁴ Riwi Sumantyo, "Pemberian Sanksi Kepada Swedia", Suara Merdeka, Kamis 5 Juni 2003.

pelaksanaan kesepakatan Jeneva 2002. Pihak ketiga (Henry Dunant Center) dan keempat (militer asing yang diharapkan dari Thailand dan Vietnam).⁵

Pemerintah Indonesia juga belum mewujudkan rencananya untuk mengajukan Hasan Tiro ke Komite Antiterorisme di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK-PBB) untuk memasukkannya ke daftar teroris internasional. Hal ini dilakukan dengan alasan Pemerintah Indonesia tidak ingin menjadikan Aceh dan GAM menjadi masalah Internasional. Kasus lepasnya **Timor-Timur** adalah internasionalisasinya masalah domestik.

Sekilas Masalah Timor-Timur (Timor Leste)

Timor Timur berintegrasi dengan Indonesia melalui perjuangan militer, berbeda dengan Aceh yang dilakukan melalui kesepakatan para pejuang Aceh dengan permintaan khusus kepada Presiden Soekarno. Timor Timur dahulu sejak tahun 1974 adalah kolonisasi dari Negara Portugal yang tidak selesai, sedangkan Aceh merupakan Kesultanan Aceh yang telah berjuang sendiri memerangi penjajah Belanda. Upaya Indonesia mengintegrasikan Timor Timur adalah dengan kekerasan dimana Indonesia melakukan perang. Indonesia tertarik untuk mengintegrasikan Timor Timur karena cadangan minyak yang terdapat di perairan Timor Timur.

Indonesia mencoba merebut Timor Timur setelah ditinggalkan oleh Portugal dengan melakukan penyerbuan. Penyerbuan itu, yang dilancarkan pagi buta 7 Desember 1975, dilakukan dalam bentuk bombardemen laut atas kota Dili, diikuti dengan pendaratan pasukan parasut dari udara dan pasukan marinir di

⁵ Teropong, "Aceh Dalam Genggaman GAM dan TNI", Suplemen Suara Merdeka 16 Desember 2002.

pantai. Serdadu-serdadu Indonesia membunuh orang-orang sipil tanpa perasaan di jalan-jalan kota Dili, dan setelah suatu peristiwa di mana para serdadu Indonesia saling baku tembak antara sesamanya, melepaskan nafsunya dalam perkosaan massal, menjarah toko-toko Tiong-hoa dan melakukan eksekusi umum di dermaga.⁶

Tindakan Integrasi berlangsung kurang dari enam bulan setelah penyerbuan, pada saat ketika 80% wilayah Timor Timur berada di tangan pasukan bersenjata Fretilin, dan 20% sisanya sedang diteror. Tetapi inilah tindakan yang diacu oleh Indonesia ketika membenarkan keabsahan kehadirannya di Timor Timur, dan ketika memperlihatkan bahwa rakyat Timor Timur sudah menyatakan pilihannya untuk berintegrasi dengan Indonesia, dan oleh karena itu tidak perlu diadakan referendum lebih lanjut. Permainan ini diakhiri ketika, pada tanggal 17 Juli 1976, Presiden Soeharto menandatangani Rancangan Undang-undang Integrasi yang secara aklamasi disetujui oleh Parlemen dua hari sebelumnya, yang secara resmi memasukkan Timor Timur ke dalam wilayah Indonesia sebagai provinsinya yang ke 27.⁷

Lepasnya Timor Timur bermula dari daerah bekas jajahan Portugal yang sejak 1975 diduduki tentara Indonesia itu yang semakin menjadi pembicaraan hangat rakyat Indonesia terutama setelah pemerintah transisi **Habibie** menawarkan dua opsi kepada rakyat Timor-Timur, status otonomi diperluas atau lepas dari negara kesatuan RI. Langkah yang ditawarkan Habibie adalah langkah bersejarah walaupun tidak berarti terhindar dari masalah karena kelompok-

⁶ <http://www.solidamor.org/content/sejarah.htm>, "Sejarah Timor Timur".

⁷ *Ibid.*

kelompok yang selama ini diuntungkan dengan invasi dan pendudukan itu, yaitu tentara dan kolaborator pro integrasi, merasa terancam kepentingannya.⁸

Indonesia mengalami kekalahan dan salah perhitungan di Timor Timur, pemerintah Orde Baru memang selama 20 tahun lebih membohongi seluruh dunia termasuk rakyat Indonesia, bahwa rakyat Timor Timur memang ingin sekali berintegrasi dengan Indonesia. Sekian lama kebohongan itu dipelihara dan dikembang-kembangkan hingga mereka sendiri percaya kepada kebohongan yang mereka ciptakan sendiri. Pada saat tentara Indonesia pada tahun 1975 memasuki Timor Timur, pada awalnya rakyat di sana menyambut dengan baik kedatangan tentara Indonesia. Mereka berharap nasib mereka lebih baik daripada di bawah Portugal bila bergabung dengan Indonesia. Tetapi pengalaman selama lebih dari 20 tahun menunjukkan kebalikannya, bukan saja keluarga Suharto beserta kroni-kroninya menjarah kekayaan Timor Timur, tetapi lebih parah lagi serdadu-serdadu dan birokrasi Suharto menginjak-injak hak-hak azasi rakyat Timor Timur.⁹

Hal itulah yang membuat Timor Timur tidak puas dengan Indonesia dan kemudian melakukan pemberontakan dengan memerangi pasukan TNI karena Indonesia mewarisi jiwa penjajah dari Belanda. Pemberontakan ini mengundang simpati dunia terutama PBB.

PBB akhirnya ikut serta memfasilitasi Indonesia dengan penempatan pasukan keamanan yang akhirnya telah membuat provokasi terhadap rakyat Timor Timur. Akibat tekanan dari rakyat Timor-Timur dan berbagai pihak akhirnya

⁸ <http://www.solidamor.org/content/solid/solid4/berita/resensi.htm>, "Nelson Mandela dari Timor-Timur".

⁹ <http://www.gopitias.com/Proceedings/berita/06224timor.html>, "Timor Timur : Tercadi: Sisa

Indonesia menawarkan dua opsi dalam jajak pendapat untuk menyelesaikan masalah di Timor Timur, opsi otonomi luas atau merdeka. Jajak pendapat membuktikan 79% memutuskan merdeka dan 21% memilih otonomi luas.

Hal ini adalah akibat dari internasionalisasi masalah domestik di forum dunia, dengan pandangan seperti itu pemerintah Indonesia mencoba untuk belajar dari kasus Timor Timur untuk menyelesaikan masalah Aceh.

Namun dengan adanya pertimbangan seperti itu justru dinilai semakin menyulitkan Pemerintah Indonesia untuk menekan Pemerintah Swedia supaya segera melakukan tindakan hukum terhadap para tokoh-tokoh Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang bermukim di pinggir Kota Stockholm, Swedia.

Kegagalan-kegagalan dalam perundingan di sisi lain bagi Pemerintah Indonesia dalam menciptakan cita-cita perdamaian RI dan GAM menunjukkan, bahwa Pemerintah Indonesia mengalami kekalahan diplomasi di tingkat internasional. Gerakan Aceh Merdeka sebagai bagian kecil dari rakyat Aceh, dipimpin oleh seorang tokoh tua di pengasingan, Hasan Tiro, berhasil mempermainkan dan mengacaukan Pemerintah Indonesia dengan tindakan teror dan bentuk kekacauan lainnya di beberapa bagian wilayah Indonesia. Hal ini merupakan pelajaran berharga bagi masa depan diplomasi Indonesia untuk berhadapan dengan penyelesaian kasus-kasus separatisme yang sama dan masih banyak terdapat di tanah air.

Sulit bila kita mencoba membayangkan dan mengandaikan GAM akan menerima syarat-syarat yang diajukan Pemerintah Indonesia, yakni Gerakan Aceh Merdeka harus menerima otonomi khusus dalam bingkai Negara Kesatuan

Republik Indonesia, berkomitmen meletakkan senjata, dan juga membubarkan **Tentara Nanggroe Atjeh (TNA)** yang masih siap bertempur di lapangan, serta berpartisipasi dalam membangun Aceh kembali dan merehabilitasi kerusakan-kerusakan Aceh akibat bencana dunia tsunami.

Sikap Gerakan Aceh Merdeka yang “keras kepala” selama ini secara jelas telah menunjukkan betapa sulit menyatukan dua kutub kepentingan/kehendak yang jauh berbeda. Gerakan Aceh Merdeka kepentingannya adalah kemerdekaan Aceh sedangkan Indonesia adalah memberi solusi otonomi khusus melalui negosiasi dengan cara damai dan menentang kemerdekaan Aceh, walau idealnya jalan damai yang mestinya ditempuh dengan penuh komitmen, kejujuran, penghargaan timbal-balik, dan secara mutlak harus dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Paling tidak ada dua target yang perlu dicapai Pemerintah Indonesia menyangkut diplomasi luar negerinya terkait operasi militer di Aceh. Pertama, pemerintah harus mampu meyakinkan pihak luar bahwa TNI/Polri di Aceh bertindak bersih, tidak melanggar hak asasi manusia (HAM). Kalau misalnya terjadi pelanggaran HAM dalam skala kecil oleh TNI/Polri, maka pemerintah harus secepatnya mengklarifikasi kasusnya secara transparan. Jangan sampai pelanggaran HAM kecil oleh TNI/Polri dipolitisir sedemikian rupa dan menjadi alat propaganda efektif GAM di luar negeri.¹⁰

Langkah-langkah Indonesia terus mengupayakan dialog dan perundingan dengan melibatkan dua Negara yaitu Swedia dengan Indonesia dan juga mediator

¹⁰ Chusnan Maghribi, “Catatan tentang Operasi Militer di Aceh” Surya Online.com, Rabu, 11 Juni 2003.

asing. Pemerintah Indonesia kini bergantung pada upaya-upaya perwakilan Pemerintah Indonesia yang melakukan diplomasi pada tiap perundingan-perundingan dengan petinggi Gerakan Aceh Merdeka Swedia.

Masalah RI dengan GAM yang dikoordinasikan dari Swedia ini menjadi menarik untuk dibahas karena dalam kasus Aceh Indonesia tidak ingin mengulang kegagalan diplomasi dalam menyelesaikan masalah di tingkat internasional, menimbang kegagalan mempertahankan Timor Timur.

B. Pokok Permasalahan

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang dikemukakan diatas maka penulis mengangkat permasalahan sebagai berikut :

“Mengapa Departemen Luar Negeri Indonesia melakukan diplomasi tingkat internasional menghadapi tokoh-tokoh Gerakan Aceh Merdeka yang berkewarganegaraan Swedia dalam penyelesaian masalah Aceh ?”.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk :

1. Memperoleh data mengenai fakta yang membuat Indonesia memilih berunding dengan GAM dan strategi-strategi yang telah dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia dalam setiap perundingan dengan pihak Gerakan Aceh Merdeka yang berada di Swedia.
2. Mengetahui lebih banyak penyebab gagalnya perundingan antara RI dengan GAM dalam mencapai kesepakatan penyelesaian konflik di Aceh.

3. Melengkapi tugas akhir sebagai syarat memperoleh gelar sarjana SI pada Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

D. Kerangka Teori

Dalam rangka membahas permasalahan di atas maka penulis berpijak pada pemikiran atau kerangka berpikir yang dianggap relevan dengan materi pembahasan sebagai kerangka acuan, yaitu :

Untuk memahami dari mana asalnya sebuah keputusan luar negeri terutama keputusan luar negeri Indonesia maka harus dilihat dari **Teori Pembuatan Politik Luar Negeri**.

Teori Pembuatan Politik Luar Negeri menurut **Jack C. Plano** diartikan sebagai berikut :

*A Strategy or planed course of action developed by decision makers of a state vis-à-vis other states or international entities aimed at achieving specific goals defined in terms of national interest.*¹¹

Dari penjelasan menurut **Jack C. Plano** itu dapat diartikan bahwa politik luar negeri suatu Negara adalah strategi atau rangkaian kegiatan tindakan yang terencana, yang dikembangkan oleh para pembuat keputusan dari satu

¹¹ Jack C. Plano dan Roy Olton, *The International Relations Dictionary*, (Holt, Rinehart and Winston, Inc., 1969), hal 127.

Negara terhadap Negara lain atau terhadap entitas internasional, ditujukan untuk meraih tujuan spesifik yang terdefinisi intern bagi kepentingan nasional.¹²

Kepentingan Nasional menurut alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah melindungi segenap bangsa dan tanah air Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Dalam alinea keempat itu Indonesia diamanatkan untuk menjalankan fungsi Hankam, fungsi Ekonomi, fungsi Sosial dan Budaya dan fungsi Politik.¹³

Berdasar pengertian tersebut maka dalam kasus Pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka melakukan perundingan di luar negeri melibatkan para perwakilan Pemerintah Indonesia telah menggunakan politik luar negeri dimana terjadi sebuah diplomasi tingkat internasional yang terencana dan diambil kebijakan demi tercapai kepentingan nasional Negara Indonesia.

Pertemuan antara dua kubu antara Pemerintah Indonesia dan GAM itu telah melakukan serangkaian tindakan yang bagi Indonesia mengedepankan kepentingan nasionalnya yaitu mempertahankan kedaulatan tidak akan melepas wilayah paling barat itu dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagi pemerintah Indonesia lepasnya Timor-Timur merupakan sebuah kesalahan diplomasi dan gagalnya mempertahankan wilayah Indonesia. Walaupun dari status antara Aceh dengan Timor-Timur berbeda. Sedangkan bagi Gerakan Aceh

¹² Djumadi Anwar, *Politik Luar Negeri Indonesia Menggalang Kerjasama Selatan dan Selatan*, (Yogyakarta : Aditya Media, 1994), hal 50.

¹³ H.M. Sabir, *Politik Bebas Aktif ; Tantangan dan Kesempatan* (Jakarta : CV. Haji Masagung, 1986), hal 51.

Merdeka mereka mengedepankan kepentingan kelompoknya yaitu menuntut kemerdekaan Aceh dengan status kewarganegaraan Swedianya.

Politik Luar Negeri juga merupakan strategi dan taktik yang digunakan oleh suatu negara dalam hubungannya dengan negara-negara lain. Politik Luar Negeri juga terdiri dari dua unsur yaitu tujuan-tujuan nasional yang ingin dicapai dan cara-cara untuk mencapainya.¹⁴

Pengertian Strategi dan Taktik

Strategi adalah suatu anjang-ancang untuk mengalahkan lawan atau mencapai tujuan lain. Strategi biasanya mengacu pada rencana yang menyeluruh atau berjangka panjang yang mencakup serangkaian gerakan yang langsung diarahkan untuk mencapai tujuan yang menyeluruh. Sedangkan pengertian **taktik** adalah gerakan tunggal atau serangkaian langkah terbatas ke arah tujuan antara (intermediate) di dalam perencanaan strategi yang lebih luas.¹⁵

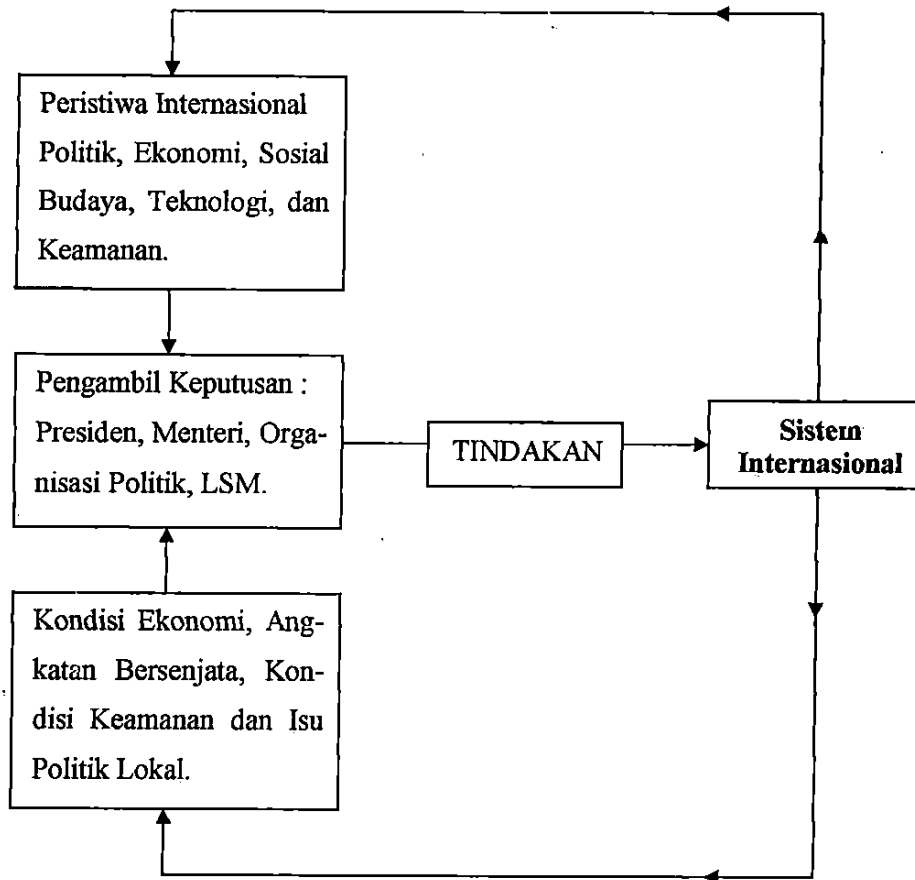
Politik Luar Negeri juga dikemukakan oleh **William D. Coplin** yaitu semua peristiwa internasional meliputi politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi, keamanan, kondisi ekonomi, angkatan bersenjata, kondisi keamanan dan isu-isu politik lokal. Semua peristiwa itu akan diolah oleh pengambil keputusan yaitu bisa dilakukan oleh Presiden/Menteri/Organisasi Politik/ dan juga Lembaga Swadaya Masyarakat untuk kemudian menjadi sebuah kebijakan dan politik luar negeri suatu negara.¹⁶

¹⁴ HM. Sabir, *ibid*, hal 10.

¹⁵ Jack C. Plano et al., *Kamus Analisa Politik*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1994), hal 253-254.

¹⁶ Djumadi Anwar, *Hand Out Kuliah Politik Luar Negeri RI*, (Yogyakarta: 2003).

Skema Politik Luar Negeri Menurut **William D. Coplin** :

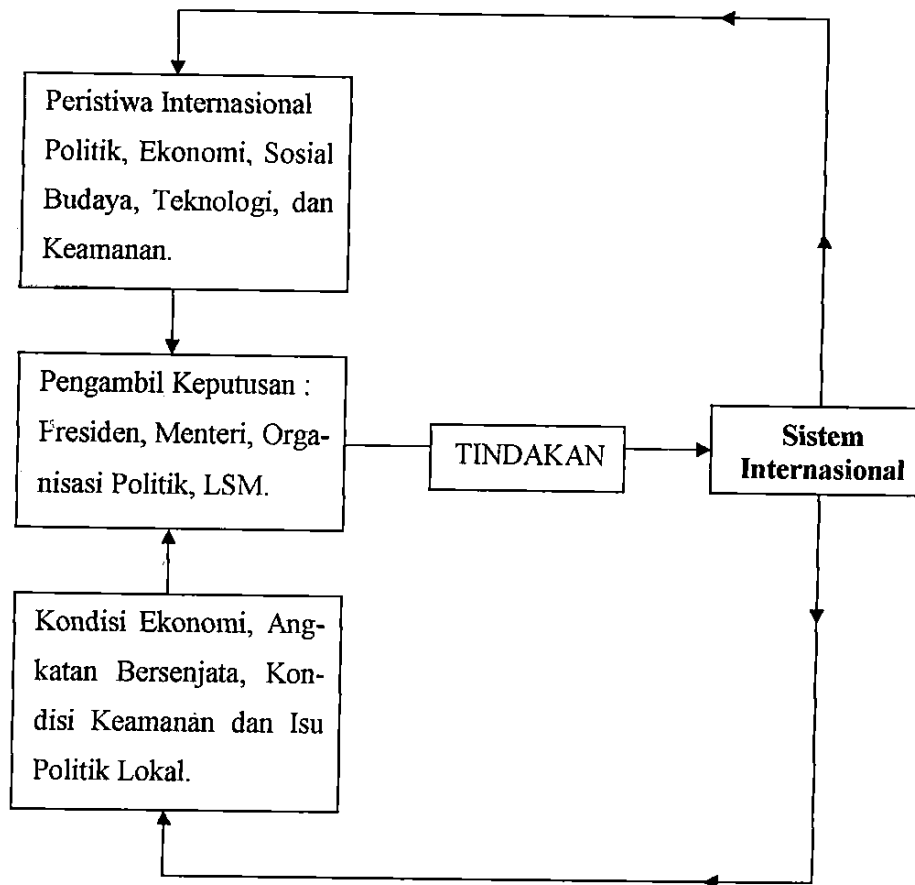


Tujuan dari politik luar negeri antara suatu Negara dengan negara lainnya biasanya berbeda, tetapi pada umumnya mengungkapkan beberapa hal yang seperti menurut **Jack C. Plano** yaitu :¹⁷

- a. Self Preservation,
- b. Independence,
- c. Economic Well-being,

¹⁷ Jack C. Plano dan Roy Olton, *The International Relations Dictionary* (Holt, Rinehart and Winston, Inc., 1969), hal 128.

Skema Politik Luar Negeri Menurut **William D. Coplin** :



Tujuan dari politik luar negeri antara suatu Negara dengan negara lainnya biasanya berbeda, tetapi pada umumnya mengungkapkan beberapa hal yang seperti menurut **Jack C. Plano** yaitu :¹⁷

- a. Self Preservation,
- b. Independence,
- c. Economic Well-being,

¹⁷ Jack C. Plano dan Roy Olton, *The International Relations Dictionary* (Holt, Rinehart and Winston, Inc., 1969), hal 128.

- d. Territorial Integrity,
- e. Military Security.

Dalam penulisan ini tujuan Politik Luar Negeri Indonesia seperti yang diungkapkan **Jack C. Plano** dalam diplomasi internasional menghadapi pihak Gerakan Aceh Merdeka yang bermukim di Swedia ditujukan pada menjaga Military Security (keamanan militer) dan Territorial Integrity (menjaga integritas wilayah) sebagai kekuatan untuk melindungi keamanan dalam negeri Indonesia dan menciptakan keamanan dan menjaga integritas wilayah Aceh dari Indonesia.

Dengan demikian tujuan kepentingan nasional yang ingin dicapai Indonesia seperti yang digambarkan dalam beberapa tujuan Politik Luar Negeri menurut **Jack C. Plano** adalah berhubungan dengan ketahanan nasional dan keamanan nasional setelah seringnya Indonesia diguncang isu teroris dan tuduhan sarang teroris.

Sedangkan tujuan Politik Luar Negeri Republik Indonesia seperti yang dijabarkan dalam GBHN 1983 adalah .¹⁸

1. Melindungi segenap bangsa dan tanah air Indonesia;
2. Mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan Negara Indonesia;
3. Menciptakan suasana adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual;

¹⁸ HM. Sabir, *op.cit*, hal 50.

4. Menciptakan suasana perikehidupan bangsa yang aman, tenteram, tertib dan dinamis, serta dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, berdaulat, tenteram dan damai;
5. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

E. Hipotesa

Departemen Luar Negeri Indonesia melakukan diplomasi di tingkat internasional menghadapi tokoh-tokoh . Gerakan Aceh Merdeka yang berkewarganegaraan Swedia dalam hal mewujudkan perdamaian di Aceh dan Indonesia karena :

1. Adanya desakan dari dalam negeri Indonesia terutama situasi politik dalam negeri, isu-isu politik lokal dan opini publik pada masa pasca Daerah Operasi Militer.
2. Adanya desakan dari dunia internasional terutama dari lembaga swadaya internasional.

F. Metode Penulisan

Dalam melakukan penelitian untuk penulisan skripsi ini penulis menggunakan teknis perpustakaan, untuk itu penulis mengambil referensi berupa buku-buku literatur, literatur hasil penelitian terdahulu, buletin, esai, surat kabar, majalah, internet maupun melalui referensi lain yang berhubungan dengan penulisan ini.

G. Jangkauan Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini penulis memilih jangkauan penulisan dari tahun 2000 sampai sekarang. Meskipun demikian uraian mengenai peristiwa-peristiwa diluar batasan tersebut yang mempunyai relevansi kuat akan diutarakan dalam penulisan.

H. Sistematika Penulisan

- Bab I : Merupakan gambaran umum mengenai maksud, tujuan dan hasil yang hendak dicapai oleh penulisan skripsi. Dalam bab ini, memuat Latar Belakang, Pokok Permasalahan, Tujuan Penelitian, Kerangka Teori, Hipotesa, Metodologi Penulisan, Jangkauan Penelitian dan Sistematika Penulisan.
- Bab II : Merupakan penjelasan mengenai asal usul lahirnya Gerakan Aceh Merdeka dan tindakan-tindakan yang ditempuh untuk melepaskan Aceh dari Indonesia.
- Bab III : Penjelasan mengenai desakan-desakan dari situasi dalam negeri termasuk isu-isu politik lokal dan opini publik mengenai permasalahan Aceh.
- Bab IV : Merupakan penjelasan mengenai desakan-desakan dari luar negeri serta dunia internasional mengenai masalah Aceh dan strategi yang dilakukan Departemen Luar Negeri Republik Indonesia dalam menghadapi pihak Gerakan Aceh Merdeka yang bermukim di Stockholm, Swedia.

Bab V : Merupakan kesimpulan dari Bab-Bab sebelumnya serta saran-saran sekaligus sebagai bab penutup.